

Radar Malang, 8 April 2018

ESAI

Hoaks Adalah Fakta yang Tertunda (?)

OLEH: NURUDIN

SUDAH banyak cara dilakukan untuk menekan penyebaran hoaks (*hoax*). Mulai dari dibuatnya aturan yang memberi sanksi pada penyebarannya, sampai imbauan lewat ajaran agama. Pertanyaannya, mengapa ia sulit diberantas? Bisa jadi salah satu alasan dari penyebarannya bahwa hoaks itu adalah fakta yang tertunda. Jika sudah begini dasarnya, maka hoaks tentu tidak mudah diberantas.

Meskipun kita yakin, penyebar itu paham bahwa informasi yang disebarkan itu hoaks, tapi tetap saja orang dengan senang hati menyebarkannya. Tak peduli apakah hoaks itu mengancam harmonisasi masyarakat, bertentangan dengan ajaran agama atau melanggar undang-undang, seseorang kadang tak peduli. Keinginan mereka, informasi disebarkan yang penting emosinya bisa terluapkan.

Mengapa hoaks tumbuh subur? Hoaks resmi tumbuh subur bak jamur di tengah hujan karena buntut perseteruan politik. Sebelum tahun 2014, mungkin kita mengenal hoaks tetapi tidak sedahsyat saat ini. Perbedaan pendapat sampai perseteruan tingkat tinggi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 terus berlanjut dan entah sampai kapan. Ini buntut ketidakpuasan di sana-sini, maka lahirlah ujaran-ujaran kebencian yang tidak produktif.

Hoaks memang semakin parah karena justru pemerintah membuat aturan-aturan pelarangan sampai sanksinya. Dari sini penyebar hoaks bukan menjadi kapok, tetapi justru semakin menggila. Bahkan ada semacam keinginan; aturan dibuat untuk dilanggar. Pemerintah dalam hal ini tentu serbasalah. Tidak membuat aturan berarti membiarkan penyebaran hoaks merajalela, namun demikian membuat aturan memang bisa menjerat, tetapi juga akan membuat perlawanan dari penyebar hoaks semakin militan.

Spiral Kebencian

Hoaks menjadi sangat dahsyat penyebarannya jika sudah menjadi target politik. Bukan pada persoalan apakah hoaks itu tidak benar, tetapi yang penting tujuannya tercapai. Misalnya, seseorang itu tidak suka dengan Presiden Jokowi, maka ia akan menyebarkan "kebencian-kebencian" berkaitan dengan Jokowi. Orang akan cenderung mencari-cari kesalahan karena hanya inilah yang

bisa dipakai untuk menyerangnya. Kemudian, sisi kesalahan dan kekurangan itu diembus-embuskan yang umumnya melalui media sosial. Targetnya satu, Jokowi turun atau tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya. Bisa juga, terganggu elektabilitasnya menjelang Pilpres 2019.

Apakah jika kelompok yang menyebar hoaks itu kemudian berkuasa ia akan bebas dari hoaks? Tidak ada jaminan. Kelompok itu akan diserang oleh kelompok pro Jokowi juga sampai target politiknya tercapai pula. Jadi, hoaks seperti spiral kebencian. Ia akan terus berputar-putar, melingkar-lingkar, naik turun sampai mencapai target politiknya.

Penyebarnya bisa jadi meyakini bahwa lama-lama hoaks itu akan menjadi fakta. Awalnya, mereka sengaja melempar hoaks, kemudian terjadi perdebatan. Dalam perdebatan itu akan ada pro dan kontra. Lalu, opini dimainkan. Kemudian akan ada usulan-usulan untuk penyelesaian sampai saling menantang di pengadilan. Dari sinilah kemudian hoaks itu bisa jadi benar sesuai fakta atau tidak.

Bisa juga penyebar hoaks memang sengaja memengaruhi opini masyarakat saja. Masyarakat yang sedang "sakit" secara politik disebarkan hoaks, jadilah mereka tambah sakit. Mereka dengan membabi buta ikut-ikutan menyebar hoaks hanya karena dengan hoaks ia bisa ikut melampiaskan atau melawan musuh-musuhnya. Sementara itu, yang dilawan juga akan mencari pembenaran-pembenaran bahwa musuh-musuhnya itu hanya tukang penyebar hoaks. "Buktikan jika yang disebarkan itu kebenaran," teriak mereka yang merasa disudutkan dengan hoaks.

Karena memang hanya target politik, sangat mungkin hoaks itu akan hilang dengan sendirinya dengan "permainan" baru. Disinilah pihak-pihak yang sengaja memainkan opini menemukan pelampiasannya. Jika hoaks yang bisa menjadi opini itu tidak manjur, ia akan mencari hoaks baru. Tak lain dengan tetap menyerang pihak yang tidak disukainya itu.

Kabar-Kabar Kebencian

Pertanyaannya, mengapa hoaks yang jelas-jelas tidak benar itu tetap disenangi? Masyarakat kita adalah masyarakat belum rasional. Maka, segala informasi yang disebarkan masyarakat bukan dipertimbangkan apakah benar atau salah, tetapi apa-

kah ia ikut mendorong kecenderungan dirinya. Misalnya, seseorang menerima pesan berantai, sebut saja hoaks, ia akan membaca sekilas, bahkan hanya judulnya saja. Jika judul itu sesuai dengan aspirasi atau keinginan dirinya, ia akan buru-buru menyebarkannya pada orang lain. Ia tak akan mungkin membaca detail atau mempertimbangkan benar atau tidaknya, lalu menyebarkannya atau tidak. Gejala ini sangat kelihatan saat kita membaca pesan-pesan di media sosial.

Ini juga terjadi pada pilihan media apa yang dijadikan rujukan informasi. Jika seseorang itu mendukung Jokowi, ia akan cenderung senang menonton Metro TV, sementara yang kontra akan menyenangi TV One. Bisa jadi, asumsi ini tidak seratus persen benar, tetapi nyata terjadi. Lihat teman sekitar Anda, apa yang ia tonton atau baca? Informasi apa yang sering didapatkannya kemudian menyebarkannya? Kesimpulannya, Anda akan tahu ke arah politik mana aspirasinya tertuju.

Meskipun seseorang itu sering berbicara ideal dengan berada di tengah-tengah pada dua perseteruan, secara nyata tetap bisa dilihat ke mana arah kecenderungan dirinya. Mungkin, seseorang bisa independen, tetapi jika dihadapkan pada persoalan pelik ia akan kelihatan "belangnya". Ini sama persis dengan ungkapan umum yang mengatakan; untuk melihat karakter seseorang berilah dia jabatan dan uang. Sifat asli dirinya akan kelihatan.

Jika seseorang sudah berorientasi pada tujuan, segala cara akan ditempuh. Termasuk dengan secara terang-terangan menyebarkan hoaks. Jadi, jika ada asumsi yang mengatakan bahwa hoaks hanya bisa dihapuskan dengan meningkatkan pendidikan masyarakat itu sama saja juga hoaks. Mengapa? Karena hoaks tidak ada kaitannya dengan tingkat pendidikan atau gelar seseorang. Hoaks tetaplah hoaks karena ia punya dunia tersendiri. Hoaks adalah dunia absurd karena kepentingan terselubung yang dibungkus dengan sopan santun. Apalagi mereka yang punya semboyan, "Hoaks adalah fakta yang tertunda".

Nurudin, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); penulis buku Perkembangan Teknologi Komunikasi (2017)